

SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2016
MATA PELAJARAN/PAKET KEAHLIAN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN (PKn)

BAB V
BHINNEKA TUNGGAL IKA



Drs. Made Suwanda, M.Si

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2016

BAB V

BHINNEKA TUNGGAL IKA

KI 1 :Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu (Pendidikan Kewarganegaraan).

KD 1.2 : Memahami substansi Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), dan ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*).

Uraian Materi

A. Bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk

Bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang memiliki karakteristik atau ciri khas tersendiri yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Kelahiran bangsa Indonesia didukung oleh banyak faktor. Kalau faktor-faktor tersebut dikelompokkan, maka ada dua kelompok besar, antara lain : (1) kelompok Faktor Obyektif, yaitu meliputi faktor ekologis, faktor geografis dan faktor demografis. Dalam kehidupan nasional kelompok ini dikategorikan pada aspek alamiah; dan (2) kelompok Faktor Subyektif, yakni faktor-faktor yang di dalamnya terdapat faktor sejarah, sosial, politik dan kebudayaan. Dalam kehidupan nasional faktor-faktor ini dikategorikan pada aspek sosial (Kaelan, 2012 : 230)

1. Faktor obyektif atau aspek alamiah sebagai pembentuk jati diri bangsa Indonesia, terdiri atas :
 - a. Secara geografis Indonesia dapat di lihat dari dua aspek yaitu : aspek posisi geografis dan aspek kondisi geografis. Ditinjau dari lokasi geografisnya negara Indonesia terletak pada posisi silang dunia yaitu berada diantara dua benua yakni benua Asia (di belahan Utara) dan benua Australia (di belahan Selatan); dan juga berada di antara dua samudra yaitu samudera Pasifik (di belahan Utara) dan samudera Hindia (di belahan Selatan). Keberadaan tersebut menjadikan negara Indonesia sebagai pusat lalulintas kekuatan dan pengaruh asing yang terbuka lebar setiap saat dari segala penjuru dengan segala

manfaat dan konsekuensinya. Dengan posisi geografis seperti itu, bangsa Indonesia menyebutnya dengan “*Indrajaya*”, yaitu Indonesia(Ind) Raya (ra) di Tengah Jalan (ja) Raya (jaya) Dunia. Ditinjau dari kondisi geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipilego state*) karena tidak memisahkan antara wilayah daratan dengan wilayah lautnya. Indonesia memandang keduanya (tanah dan air) sebagai satu kesatuan wilayah yang utuh dan bulat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia menyebut negaranya dengan sebutan *Tanah Air, Ibu Pertiwi, Tanah Tumpah Darah* dan sebagainya.

- b. Faktor ekologis, negara Indonesia beriklim tropis. Hal ini sebagai akibat adanya pengaruh posisi geografis Indonesia yang berada pada lintang garis katulistiwa. Posisi ini mengakibatkan Indonesia memiliki dua musim yakni : musim hujan dan musim kemarau. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia berada pada posisi 6° LU – 11° LS dan 95° BT - 141° BT. Kondisi seperti ini mengakibatkan banyak wisatawan asing senang datang ke Indonesia, karena di Indonesia mereka dapat melihat dan merasakan sinar matahari hampir setiap hari sepanjang tahun, sementara hal tersebut tidak pernah bisa mereka nikmati di negara asalnya. Semua itu merupakan faktor yang ikut mempengaruhi perkembangan demografis, ekonomi, sosial dan juga kultur bangsa Indonesia.
2. Faktor subyektif atau aspek sosial, yang meliputi politik, ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan. Faktor subyektif ini sangat dipengaruhi faktor obyektif atau aspek alamiah terutama posisi geografis.

Wilayah Indonesia yang berada pada posisi silang dunia menjadi pusat lalu lintas kekuatan dunia berpengaruh kuat pada aspek sosial. Pengaruh asing yang terbuka lebar setiap saat dan dari segala penjuru dunia telah menjadikan kehidupan bangsa Indonesia seperti sekarang ini. Budaya, adat maupun kebiasaan-kebiasaan yang di bawa oleh mereka yang masuk ke Indonesia akan mengakibatkan terjadinya proses akulturasi maupun asimilasi dengan budaya setempat. Melalui proses akulturasi dan asimilasi budaya tersebut, yang terjadi pada bangsa Indonesia kemudian mewujudkan dalam kebhinnekaan. Bertemunya kebudayaan yang berbeda melalui proses akulturasi dan asimilasi dapat menciptakan kedamaian tanpa terjadi kekerasan. Aspek sosial yang berpengaruh tersebut dapat dibagikan sebagai berikut :

Bagan 1 :Perbandingan antara negara-negara pada benua yang berada di belahan dunia utara dan negara-negara di belahan dunia selatan :

Aspek yang diukur	Kondisi di :	
	Utara	Selatan
Demografi	+/- 2 milyar	+/- 23 juta
Ideologi	Komunisme	Liberalisme
Politik	Demokrasi rakyat	Demokrasi parlementer
Ekonomi	Ekonomi terpusat	Ekonomi liberal
Sosial	Sosialisme/komunisme	Individualisme
Budaya	Timur	Barat
Pertahanan	Kontinental/daratan	Maritim/laut

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia juga menjadi faktor yang mempengaruhi proses pembentukan masyarakat, bangsa serta identitas nasional Indonesia. Interaksi yang terjadi antar faktor-faktor yang adatersebut di atas melahirkan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia beserta dengan identitasnya seperti sekarang ini.

Muh. Yamin (dalam Kaelan. 2012 : 101) menjelaskan bahwa berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarahnya, yaitu sejak adanya kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Lebih lanjut dijelaskan bahwa negara Indonesia terbentuk melaluitiga fase, yakni : *fase pertama*, yang dimasukkan pada fase ini adalah jaman pada saat berdirinya kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini berkedudukan di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Kota Palembang yang berada di bawah wangsa Syailendra. Pada saatitu negara kebangsaan Sriwijaya bercirikan kedatuan; *fase kedua* : pada zaman kerajaan Majapahit yang berkedudukan di Jawa Timur tepatnya di Kabupaten Mojokerto. Negara kebangsaan yang ada pada zaman Majapahit ini bercirikan keprabuan. Kedua negara kebangsaan (Sriwijaya dan Majapahit) tersebut dikategorikan sebagai negara kebangsaan Indonesia lama; dan *fase ketiga* : yaitu negara kebangsaan modern, yakni negara Indonesia merdeka yang diproklamasikan

oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang diuraikan tersebut di atas menunjukkan bahwa negara Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang, sehingga terjalin adanya suatu ikatan batin yang begitu kuat di antara anggota masyarakatnya menjadi sebuah bangsa. Kemudian memilih mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan tujuan maupun cita-cita bersama. Dalam proses menuju kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini, ada berbagai elemen pembentuknya, yang tersusun atas berbagai macam faktor khas, unik dan berbeda-beda secara etnik, geografis, kultural maupun ciri-ciri primordial lainnya.

Suryo (2002) yang mengutip pendapatnya Robert de Ventos, mengemukakan bahwa identitas nasional terbentuk dari interaksi historis yang terjadi antar beberapa faktor, antara lain :faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik dan faktor reaktif.

1) *Faktor primer*, terdiri atas etnisitas, teritorial, bahasa, agama dan sejenisnya. Bangsa Indonesia yang tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, agama, wilayah maupun bahasa daerah, namun merupakan satu kesatuan dengan kekhasannya masing-masing. Perbedaan yang dimiliki masing-masing merupakan ciri khas masing-masing kelompok yang ada menyatukan diri dalam suatu persekutuan hidup bersama menjadi sebuah bangsa yaitu bangsa Indonesia. Kesatuan yang dibentuk tidak menghilangkan keanekaragaman yang ada sebelumnya. Hal inilah yang disebut dengan "*Bhinneka Tunggal Ika*"

2) *Faktor pendorong*, meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi, adanya angkatan bersenjata dan pembangunan lainnya dalam kehidupan negara. Suatu negara menjadikan kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi serta pembangunan yang dilakukan bangsa dan negara sebagai identitas nasional yang bersifat dinamis. Bagi bangsa Indonesia, identitas nasionalnya sangat ditentukan oleh prestasi dan kemampuan untuk melaksanakan pembangunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Untuk dapat melakukan pembangunan dan memperoleh prestasi, bangsa Indonesia harus selalu meningkatkan persatuan dan kesatuan serta adanya kesamaan pandangan dan langkah untuk melakukan pembangunan.

3) *Faktor Penarik*, mencakup kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Dalam kaitan ini, bangsa Indonesia telah menjadikan unsur bahasa menjadi bahasa persatuan. Dengan demikian bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi negara dan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah sepakat untuk memilih bahasa Melayu menjadi bahasa nasional, bahasa yang digunakan dalam forum-forum resmi dalam melakukan komunikasi antar etnis yang berbeda. Meskipun masing-masing etnis memiliki bahasa daerah yang digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari antar sesama anggota masyarakat daerahnya. Dalam hal yang terkait dengan pendidikan nasional maupun birokrasi, telah dikembangkan dan bahkan terus diupayakan untuk dikembangkan sesuai dengan kesepakatan bersama.

4) *Faktor reaktif*, yang meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternative melalui memori kolektif rakyat. Bangsa Indonesia yang memiliki sejarah yang cukup panjang sebagai bangsa terjajah yakni selama \pm 350 tahun dijajah Belanda, sangat dominan dalam mewujudkan faktor reaktif melalui memori kolektif rakyat Indonesia. Penderitaan, kesengsaraan hidup yang dialami rakyat pada saat dijajah, serta semangat bersama dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan merupakan faktor yang sangat strategis dalam membentuk memori kolektif rakyat. Dimilikinya semangat perjuangan, dan adanya kerelaan berkorban untuk menegakkan kebenaran menjadi identitas yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Indonesia.

Proses pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia telah berkembang sejak sebelum bangsa Indonesia merdeka. Dan bahkan pada saat masih ada di bawah tekanan penjajah, bangsa Indonesia lebih intens melakukan interaksi yang tercakup ke dalam empat faktor sebagaimana disebutkan di atas. Proses interaksi dari semua faktor yang ada kemudian terbentuk menjadi karakter bangsa yang tersimpul sebagai identitas nasional. Pencarian identitas nasional sebetulnya sangat terkait erat dengan dan melekat di dalam perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia di bangun dengan memadukan unsur-unsur masyarakat lama (zaman kerajaan) dan negara dengan prinsip nasionalisme modern menjadi satu kesatuan bangsa. Dengan demikian, pembentukan identitas nasional Indonesia terkait erat dengan unsur-unsur yang lain, seperti : sosial,

ekonomi, budaya, etnis, agama, geografis. Semuanya itu terbentuk melalui suatu proses yang cukup panjang, dan menjadi identitas serta jati diri bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain.

B. Lambang Negara Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada lambang negara yakni Garuda Pancasila merupakan identitas dan jati diri bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersama-sama dengan lambang negara yang lain, seperti : Bendera negara merah Putih, Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, serta Lagu Kebangsaan Indonesia yakni Indonesia Raya merupakan lambang atau simbol persatuan. Lambang-lambang negara tersebut merupakan simbol yang mencerminkan :

- a. Manifestasi kedaulatan bangsa dan negara Indonesia dalam melakukan pergaulan dengan negara lain dalam kancah internasional
- b. Kemandirian bangsa Indonesia
- c. Eksistensi atau jati diri bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
- d. Persatuan dan kesatuan baik bangsa yang beraneka ragam maupun wilayah yang terdiri atas ribuan pulau.

Lambang-lambang yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia, wajib dihormati oleh bangsa Indonesia sendiri dan bangsa-bangsa lain, karena itu merupakan simbol persatuan dan kesatuan bangsa, serta kedaulatan Indonesia. Bangsa Indonesia harus merasa bangga akan semua lambang yang dimiliki. Seluruh bangsa harus mau dan mampu menjaga dan tetap menghormatinya, oleh karena keempat lambang bangsa dan negara itu (bendera Merah Putih, Burung Garuda Pancasila, Bahasa Indonesia dan lagu Indonesia Raya) membuktikan kepada bangsa Indonesia sendiri dan kepada dunia bahwa mereka (keempat lambang) tersebut telah mampu mempersatukan semua serpihan-serpihan yang berserakan di seluruh wilayah nusantara menjadi satu dalam sebuah bangsa besar yaitu Bangsa Indonesia yang hidup dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang mencerminkan adanya pengakuan akan keanekaragaman bangsa dan wilayah Indonesia, namun bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat kita temukan di dalam Garuda Pancasila yang dijadikan lambang negara. Hal ini di atur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 36A yang berbunyi : Lambang negara ialah Garuda Pancasila

dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Pengaturan lambang negara didalam UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut merupakan pengakuan secara yuridis konstitusional oleh negara akan keberadaan lambang-lambang negara. Hal itu sekaligus merupakan penegasan secara yuridis formal yang dilakukan negara Indonesia terkait penggunaan simbol-simbol negara yang merupakan identitas dan jati diri bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sepanjang perjalanan sejarah bangsa dan Negara Republik Indonesia, lambang-lambang negara yang ada di atur melalui Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berlaku beserta peraturan pelaksanaannya. Hal ini dimaksudkan supaya lambang negara tersebut secara yuridis formal memiliki kekuatan hukum, sehingga dipatuhi dan ditaati oleh semua warga negara. Pada peraturan-perundangan tersebut juga mengatur cara-cara penggunaannya. Warga Negara harus menggunakan lambing negara sesuai dengan yang di atur dalam peraturan perundangan yang ada dan tidak boleh seenaknya sendiri.

Adapun pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945 yang mengatur tentang Lambang Negara antara lain :

- a. Pasal 35 : Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih
- b. Pasal 36 : Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia
- c. Pasal 36A : Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika
- d. Pasal 36B : Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya

Untuk menjaga adanya kepastian hukum, standarisasi serta ketertiban dalam penggunaannya dirasa sangat perlu dibuatkan peraturannya. Peraturan yang dimaksud berisikan tentang berbagai hal yang terkait dengan penetapan, tata cara penggunaan serta sanksi yang diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Hal itu dilakukan dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 sebagai pengganti Undang Undang No. 43 tahun 1958. Disamping untuk menetapkan cara penggunaan lambang Bendera Merah putih, Bahasa, Garuda Pancasila dan Lagu Indonesia Raya, hal ini juga untuk melaksanakan amanat ketentuan yang diatur pada pasal 36C UUD Negara RI Tahun 1945. Pada Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 di atur tentang lambang-lambang negara, antara lain :

- a) Pasal 4, mengatur tentang Bendera Negara

Pada pasal 4 ayat (1) ditentukan:

“Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ (dua-pertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama”.

b) Pasal 25, mengatur tentang Bahasa Negara

Pasal 25 ayat (1) ditentukan :

“Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resminegara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar NegaraKesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumberdari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yangdikembangkan sesuai dengan dinamika peradabanbangsa”.

c) Pasal 46 yang mengatur tentang Lambang Negara ditentukan :

“Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentukGaruda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelahkanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantaipada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ikaditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda”.

d) Pasal 58 mengatur tentang Lagu kebangsaan

Pasal 56 ayat (1) ditentukan :

“Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubaholeh Wage Rudolf Supratman.

Pasal 56 ayat (2) ditentukan :

“Lagu Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dariUndang-Undang ini”.

C. Bhinneka Tunggal Ika sebagai Kearifan Lokal Bangsa Indonesia

Lambang Negara Garuda Pancasila melambangkan : 1) Burung yang digunakan adalah Burung Garuda, 2) Di dalamnya atau di dada Burung Garuda terdapat tameng atau perisai yang memuat sila-sila Pancasila, 3) Kaki Burung Garuda menggapit pita yang bertuliskan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Jadi di dalam lambang Garuda Pancasila terdapat tiga unsur yakni :

1. Gambar Burung Garuda
2. Simbol sila-sila Pancasila
3. Seloka *Bhinneka Tunggal Ika*

Ad1. Gambar Burung Garuda

Burung Garuda merupakan kekayaan satwa nusantara sebagai salah satu jenis satwa yang besar dan kuat. Sebagai seekor satwa, burung Garuda dapat terbang tinggi ke angkasa. Sebagai lambang negara hal ini dipergunakan untuk melukiskan bahwa bangsa Indonesia memiliki cita-cita yang tinggi. Di dalam sejarah nenek moyang bangsa Indonesia yang umumnya menganut agama Hindu, burung Garuda diyakini sebagai kendaraan Dewa Wisnu. Menurut ajaran yang diyakini umat Hindu, Dewa Wisnu merupakan sinar suci Sang Hyang Widhi Tuhan Yang Maha Esa dalam fungsinya sebagai pemelihara. Oleh karenanya Garuda dianggap sebagai lambang pembangunan dan pemelihara kehidupan. Dituliskan di dalam kitab Marowangsa bahwa Raja Airlangga menggunakan Garuda-Muka sebagai lencana. Dan demikian juga dengan kerajaan Kedah menggunakan lambang Garuda Garagasi sebagai lambang pemelihara (Ismaun, 1975 : 119).

Ad 2. Simbol sila-sila Pancasila

Pada perisai yang ada dan terpampang di dada Burung Garuda terdapat lima buah ruang yang masing-masing memiliki arti, sebagai berikut :

1. Di bagian atau ruang tengah perisai terdapat gambar bintang bersudut lima dengan cahaya yang memancar melambangkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Di ruang kiri bawah perisai terdapat gambar tali rantai bermata bulatan dan persegi melambangkan sila kedua yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Di ruang kiri atas perisai terdapat gambar pohon beringin yang begitu rimbun melambangkan sila ketiga yakni Persatuan Indonesia
4. Di bagian atau ruang kanan atas perisai terdapat gambar kepala banteng yang menggambarkan sila keempat yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Di ruang kanan bawah perisai terdapat gambar padi dan kapas yang melambangkan sila kelima yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Ad3. Sloka *Bhinneka Tunggal Ika*

Sloka *Bhinneka Tunggal Ika* melambangkan realitas bangsa dan negara Indonesia yang tersusun dari berbagai macam suku, adat istiadat, agama, golongan, kebudayaan, serta wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau kemudian menyatu menjadi sebuah bangsa dan Negara Indonesia. Istilah *Bhinneka Tunggal Ika* diambilkan dari istilah bahasa Jawa Kuno (*Sansekerta*) yang berasal dari zaman kerajaan Majapahit. Pada saat Majapahit berada di bawah raja Hayam Wuruk dan maha patih Gajah Mada, Majapahit mengalami masa kejayaannya. Pada saat itu berkembang berbagai macam aliran atau sekte dari agama Hindu, dan berbagai macam tradisi. Hal ini tampak dalam tantrayana dan upacara Crada yaitu suatu upacara yang dilakukan untuk menghormati roh para leluhur atau nenek moyang yang sudah meninggal. Berbagai macam agama dan aliran yang ada berkembang dan hidup berdampingan dengan rukun. Mereka saling menghargai, menghormati serta saling toleransi antar pemeluk agama atau aliran yang berbeda. Berbagai unsur agama yang berbeda tersebut hidup dalam suatu kerajaan di bawah kekuasaan Majapahit dapat hidup rukun dan damai. Hal itu dapat terjadi karena anggota masyarakat yang beraneka ragam tersebut hidup penuh dengan sikap toleransi.

Apabila *Bhinneka Tunggal Ika* dikaji dari segi bahasa, sloka tersebut mengandung makna : *bhinneka* berasal dari bahasa *sansekerta* yang terdiri dari dua suku kata yaitu : ***bhinna*** dan ***ika***. *Bhina* artinya berbeda, sedangkan *ika* artinya itu. Kedua kata tersebut kemudian digabungkan menjadi *Bhinneka* yang berarti berbeda itu. Sementara *Tunggal* berasal dari *tunggal* artinya satu dan *Ika* artinya itu. Kedua kata itu digabungkan, kata *Tunggal Ika* artinya satu itu. Jika digabungkan seluruhnya menjadi *Bhinneka Tunggal Ika* yang artinya berbeda itu, satu itu, yang maksudnya adalah meskipun berbeda-beda tetapi semuanya adalah satu.

Menurut Attamimi, *Bhinneka Tunggal Ika* harus dimaknai dengan benar karena jika salah dalam memahami makna yang terkandung di dalamnya, di dalam implementasinya juga keliru. Attamimi memaknai semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai : “meskipun satu, tetapi hakikatnya adalah berbeda-beda, beraneka ragam”. Maksudnya, bahwa meskipun bangsa Indonesia hidup dalam satu negara yakni dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun hakikatnya adalah berbeda-beda atau beragam. Berbeda dalam suku bangsa, berbeda dalam budaya, berbeda adat istiadat, budaya dan sebagainya, semua itu merupakan suatu realitas, suatu kenyataan yang tak terbantahkan. Namun demikian **perlu diingat**, bahwa bangsa yang beragam ini telah bersumpah dan bertekad untuk hidup

sebagai satu bangsa dan dalam satu wadah yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya dengan memahami makna yang terkandung di dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* tersebut dengan benar, maka tidak akan pernah ada warga negara yang mau memaksakan kehendaknya kepada orang yang berbeda. Terkait dengan hal ini Ir. Soekarno sendiri pernah mengatakan bahwa : Biarkanlah bunga tumbuh dan berkembang dengan beraneka ragam jenis dan warna di dalam taman apsarinya negara Indonesia. Maksudnya bahwa membiarkan dan memberikan kebebasan kepada semua warganegara hidup, tumbuh dan berkembang meskipun memiliki perbedaan-perbedaan dalam segala aspek kehidupan, namun tetap menjadi satu di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. Makna Bhinneka Tunggal Ika

Sebagaimana telah di uraikan di muka, bahwa terbentuknya bangsa dan Negara Indonesia melalui suatu proses sejarah yang begitu panjang yaitu melalui proses sejak jaman kerajaan dan kemudian diteruskan pada jaman penjajahan yang berlangsung selama ± 350 tahun lamanya. Bangsa dan Negara Indonesia terbentuk dari berbagai unsur baik masyarakatnya maupun wilayahnya. Unsur masyarakat yang membentuk bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, berbagai macam adat istiadat, kebudayaan serta agama atau keyakinan. Sedangkan unsur wilayah yang membentuk bangsa dan Negara Indonesia adalah wilayah kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau (± 17.508 pulau) yang tersebar di dalam perairan atau laut Indonesia. Keadaan yang beranekaragam tersebut menjadi tali pengikat bagi persatuan dan kesatuan. Karena keanekaragaman yang ada merupakan daya penarik ke arah terjalannya suatu ikatan kerjasama. Perbedaan yang terjelma dari keanekaragaman dapat menimbulkan adanya suatu kekuatan untuk bersintesis dan bersinergi secara positif bagi terciptanya persatuan dan kesatuan yang kokoh. Perbedaan yang ada tidak harus dipersoalkan apalagi untuk dipertentangkan.

Sinergitas yang terjalin diantara perbedaan yang ada, kemudian menciptakan persatuan dan kesatuan dituangkan dalam suatu asas kerokhanian. Asas kerokhanian itu hakikatnya merupakan kepribadian serta jiwa bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Oleh karena itu prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah

bersifat “*majemuk tunggal*”. Nasionalisme Indonesia terbentuk dari beberapa unsur, antara lain:

a. *Kesatuan Sejarah*

Bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dari suatu proses sejarah yang sangat panjang, sejak jaman pra sejarah, jaman kerajaan, diteruskan pada saat kedatangan bangsa penjajah, lalu bangkitnya kesadaran sebagai suatu bangsa melalui organisasi Budi Utomo tahun 1908, berlanjut dengan masa penegas yakni dengan dicituskannya Sumpah Pemuda tahun 1928, dan akhirnya saat diporklamasikan Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

b. *Kesatuan nasib*

Penjajahan yang dilakukan Belanda berlangsung selama ± 350 tahun membuat rakyat mengalami penderitaan, kemiskinan, kemelaratan, kebodohan dan sebagainya, mengakibatkan seluruh rakyat Indonesia merasa dirinya senasib sepenanggungan. Oleh karenanya kemudian mereka bersatu dan bersama-sama melakukan perjuangan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Atas berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa akhirnya perjuangan yang dilakukan dapat terwujud. Perjuangan yang dilakukan dengan penuh pengorbanan dan dilakukan secara ikhlas, akhirnya mencapai titik puncaknya sehingga bangsa Indonesia dapat menikmati kemerdekaannya.

c. *Kesatuan kebudayaan*

Meskipun bangsa Indonesia memiliki beranekaragam kebudayaan daerah, namun keseluruhan kebudayaan tersebut merupakan satu kebudayaan yaitu kebudayaan nasional Indonesia. Karena kebudayaan nasional adalah merupakan puncak-puncak kebudayaan daerah. Artinya dasar bagi tumbuh dan berkembangnya kebudayaan nasional berasal dari akar-akar kebudayaan yang dimiliki daerah.

d. *Kesatuan Wilayah*

Bangsa Indonesia menjadikan wilayah sebagai tempat hidup dan tempat mencari penghidupan. Bangsa Indonesia menyebut wilayahnya dengan sebutan tanah tumpah darah dan/atau ibu pertiwi. Meskipun wilayah Indonesia terdiri atas beribu-

ribu pulau (\pm 17.508 pulau), namun semuanya merupakan satu kesatuan wilayah yang terdiri atas wilayah perairan yang di dalamnya terdapat pulau atau kepulauan.

e. *Kesatuan Asas Kerokhanian*

Bangsa Indonesia memiliki kesamaan cita-cita, kesamaan pandangan hidup. Pandangan hidup dan cita-cita atau ideologi yang dimiliki bangsa Indonesia berakar dari pandangan hidup individu masyarakatnya, yang kemudian menjadi pandangan hidup masyarakat, dan akhirnya menjadi pandangan hidup bangsa dan Negara. Dengan demikian bangsa Indonesia memiliki kesatuan asas kerokhanian yang dijadikan sebagai cita-cita dan pandangan hidupnya yaitu Pancasila.

Bangsa Indonesia mendirikan Negara kesatuan Republik Indonesia bukan di dasarkan pada kausalitas manusia sebagai mahluk individu yang bebas sebagaimana Negara liberal. Negara Indonesia bukanlah dibentuk dari proses penyatuan individu-individu dalam *free fight liberalism* dan penindasan bari yang kuat terhadap yang lemah. Masyarakat Indonesia membentuk bangsa dan mendirikan organisasi Negara Kesatua Republik Indonesia adalah sebagai sebuah proses dari kehendak bersama. Oleh karenanya Negara Indonesia pada hakikatnya merupakan sebuah Negara kebangsaan, bukan Negara liberal atau individual, sehingga Negara harus melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mencapai kepentingan dan kesejahteraan hidup bersama.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk atas dasar kodrat manusia yakni sebagai mahluk individu sekaligus sebagai mahluk sosial. Bukan atas dasar teori organis yang dikemukakan oleh pemikir-pemikir individualis seperti : Thomas Obbes, JJ. Rousseau dan lainnya. Berdasarkan teori organis, berdirinya Negara karena adanya perjanjian masing-masing individu anggota masyarakat (*do contrac sosial*). Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dari sejarah bangsa yang sangat panjang. Seluruh masyarakat sama-sama mengalami penderitaan di bawah penjajah selama kurang lebih 350 tahun, melakukan perjuangan bersama-sama untuk mengusir penjajah, sehingga di antara anggotanya memiliki perasaan yang sama, merasa senasib dan sepenanggungan. Dengan dasar ini mereka bersatu dan berkehendak untuk hidup bersama dalam wilayah Indonesia. Dengan demikian negara Indonesia merupakan negara persatuan, yaitu suatu negara adalah masyarakat itu sendiri.

Penyelenggara negara melakukan tugas dan wewenangnya atas nama Masyarakat, sehingga hakikatnya masyarakat mewakilkan dirinya kepada penyelenggara negara untuk mengatur dan menata dirinya (masyarakat) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hubungan yang terjadi adalah di mana negara tidak memandang masyarakat sebagai obyek yang berada di luar negara, melainkan memandang bahwa masyarakat sebagai bagian dan sumber pembentuk dirinya. Maksudnya masyarakat dipandang sebagai suatu unsur yang ada dalam diri negara, tumbuh dan berkembang bersama negara. Sebagai satu kesatuan totalitas, masyarakat memiliki suatu kesatuan yang meliputi lahiriah maupun batiniah yang menjadi dasar dalam hidup kebangsaan (Besar, 1991 : 83).

Pada saat membentuk negara nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang telah menjadi nilai-nilai kebijakan lokal (*local wisdom*) dipakai dasar dalam memandang dan menyelesaikan setiap persoalan yang ada baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Pada saat mendirikan negara nilai-nilai tersebut dirumuskan dalam sistem nilai dan dijadikan sebagai pandangan hidup.

Berdasarkan ciri khas ataupun karakteristik yang dimiliki bangsa Indonesia tersebut, maka dalam proses membentuk negara, ada beberapa bentuk ciri khas atau karakteristik tersebut yang diambil. Adapun karakteristik atau ciri khas yang dimaksudkan, antara lain :

1. Bangsa Indonesia mendirikan Negara berdasarkan Pancasila
2. Bangsa Indonesia mendirikan Negara Persatuan
3. Bangsa Indonesia mendirikan Negara Kebangsaan
4. Bangsa Indonesia mendirikan Negara Integralistik

E. Sikap hidup dalam masyarakat majemuk

Sebagai bangsa dan negara yang masyarakatnya majemuk dalam berbagai macam aspek kehidupan, disatu sisi merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya, namun di sisi lain menjadi hal potensial untuk terjadinya disintegrasi bangsa. Oleh karenanya kepada setiap warga bangsa dituntut memiliki komitmen untuk selalu mengedepankan keutuhan sebagai sebuah bangsa. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan bersikap dan berperilaku antara lain :

- a. Mendahulukan kepentingan umum (Negara dan bangsa) di atas kepentingan yang lainnya
- b. Memiliki kesadaran akan arti pentingnya penghargaan terhadap identitas bersama dalam rangka mencapai tujuan bersama.
- c. Adanya solidaritas yang di dasarkan atas kesantunan

Pancasila yang dijadikan sebagai pandangan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang nilai-nilainya bersumber dari pandangan hidup individu dan pandangan hidup masyarakat. Karena itu pengamalan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sangat penting dan perlu dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang masyarakatnya beragam.

F. Integrasi Nasional

Integrasi nasional merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang baru merdeka dan negara-negara berkembang, terutama di dalam upaya membina dan mempertahankan kelangsungan hidup, persatuan dan kesatuan bangsanya. Terlebih-lebih bagi bangsa Indonesia dengan masyarakat sangat majemuk dan wilayah begitu luas yang terdiri atas ribuan pulau-pulau. Pada saat memasuki abad 21 ini, bangsa Indonesia dihadapkan pada tekanan dan pengaruh globalisasi di mana teknologi informasi, komunikasi dan transportasi telah menyajikan wacana dan tontonan yang sama sekali baru dan dapat diakses kapan saja, dimana saja dan oleh siapa saja. Akibatnya, bangsa Indonesia mau atau tidak, suka atau tidak harus masuk di dalamnya dengan segala resiko dan konsekuensinya. Dalam memasuki era global, permasalahan utama yang harus dihadapi dan diatasi bangsa Indonesia adalah menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup serta persatuan dan kesatuan bangsa di dalam bingkai empat pilar (elemen dasar : penulis) kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945.

Pembinaan integrasi nasional belakangan ini menjadi tema penting yang perlu dibahas untuk melihat kembali kesadaran berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta untuk menemukan kembali kebudayaan dan identitas nasional dalam membina dan menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa yang utuh dan bulat. Bangsa Indonesia yang terbentuk dari kemajemukan latar belakang Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) dengan menempati wilayah kepulauan, pada dasarnya adalah realitas hidup di dalam

masyarakat, yang di satu sisi merupakan kekayaan atau asset bangsa yang tak ternilai harganya, namun di sisi lain, hal tersebut menjadi sumber kerawanan dan ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa terutama jika ada pihak-pihak yang memanfaatkannya secara tidak bertanggung jawab. Bagi bangsa Indonesia, yang diperlukan saat ini adalah harus siap menghadapi dan mengatasi berbagai masalah baik yang berasal dari dalam negeri maupun tekanan global yang secara potensial dapat mengganggu perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa atau integrasi nasional.

Perjalanan integrasi nasional bangsa Indonesia telah mengalami pasang surut dan bahkan telah menggeser nilai-nilai kearifan lokal yang dahulu dijadikan tatanan dan pedoman bertingkahtlaku oleh masyarakat. Namun kini telah berubah ke arah cara hidup yang lebih praktis dan instan dengan mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal mereka sendiri. Sejak lama yakni zaman sebelum merdeka, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki budaya luhur. Hal ini tercermin di dalam nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) dan diimplementasikan serta digunakan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai kearifan lokal (*localwisdom*) tersebut, kemudian dijadikan sebagai landasan yang kokoh dalam membangun nilai-nilai luhur budaya bangsa, yang terbentuk atau tersimpul menjadi identitas nasional. Nilai-nilai kearifan lokal yang terbentuk terbukti mampu menyelesaikan setiappersoalan atau permasalahan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara baik pada tataran mewujudkan aspek kesejahteraan dan keamanan maupun dalam menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pergeseran nilai yang terjadi belakangan ini pada dasarnya adalah sebuah fenomena yang harus dicermati dan disikapi secara teliti dan hati-hati sehingga perjalanan bangsa Indonesia tetap berada pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal bangsa sendiri. Bangsa Indonesia akan mampu menghadapi dan mengatasi tekanan yang terjadi sebagai akibat globalisaipabila tetap berpegang pada budaya dan kearifan lokal bangsa Indonesia sendiri. Dengan kata lain manakala semua elemen bangsa tetap konsisten pada jatidiri dan kearifan lokal bangsa Indonesia sendiri, segala macam tekanan dan pengaruh negatif yang ditimbulkan olehglobalisasi dengan mudah dapat diatasi.

Negara Indonesia yang berbentuk negara kepulauan memiliki karakteristik dan ciri khas yang dibingkai dalam azas nusantara yaitu suatu konsep yang memandang wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, yang terdiri atas wilayah perairan dan di

dalamnya terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau. Wawasan Nusantara memandang bahwa perairan/laut adalah sebagai penghubung antar pulau yang satu dengan pulau yang lain menjadi satu kesatuan. Bukan sebagai pemisah seperti yang di anut Ordenansi 1939. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, bangsa Indonesia belum sepenuhnya mampu mengelola wilayahnya dalam satu kesatuan yang utuh dan bulat dengan segenap isinya. Akibatnya masih ada beberapa wilayah Indonesia yang belum dapat dikuasai, dimanfaatkan dan diberdayakan segala potensi yang terkandung di dalamnya secara maksimal, sehingga seringkali terjadi keinginan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seperti misalnya, daerah Aceh, Papua, dan beberapa daerah lainnya. Atau penduduk-penduduk yang ada di wilayah perbatasan antara Indonesia dengan negara lain. Ada beberapa dari mereka yang pindah ke negara yang bersebelahan, seperti : penduduk di daerah Papua, Kalimantan, dan lainnya.

Berdasar latar belakang di atas maka dirasa perlu untuk menanamkan kembali kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya integrasi nasional yang mantap.

1. Integrasi nasional dan latar belakang sejarah

Pada masa sebelum kemerdekaan, di Indonesia telah berdiri unit kesatuan sosial yang berkembang pada setiap suku di seluruh wilayah nusantara. Unit kesatuan sosial tersebut, kemudian berkembang menjadi sistem sosial-politik yang diimplementasikan ke dalam sistem pemerintahan adat dan/atau kerajaan yang hidup pada saat itu. Fenomena sistem pemerintahan kerajaan atau adat tersebut telah memunculkan kemajemukan di dalam cara menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan keamanan warganya. Pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman sejarah bangsa pada zaman kerajaan adalah adanya tatanan dan panutan dalam sistem ketatanegaraan di negeri ini.

Pada masa lalu, wilayah nusantara pernah mengalami masa kejayaannya, yang ditandai oleh berdirinya negara-negara kerajaan, baik berskala kecil maupun besar, di seluruh wilayah nusantara. Masing-masing negara kerajaan yang ada mampu membangun struktur sosial, struktur politik dan sistem pemerintahan yang memiliki ciri khas masing-masing . Setiap negara kerajaan memiliki pengaruh kuat terhadap rakyat dalam membangun dan mengembangkan aspek-aspek kehidupan berbangsa,

bernegara serta bermasyarakat. Sebagian negara kerajaan telah membentuk tatanan kehidupan yang mapan dan memiliki pengaruh sangat luas seperti negara kerajaan Sriwijaya dan negara kerajaan Majapahit.

Setiap negara kerajaan baik yang berskala lokal maupun yang berskala global telah menghasilkan keanekaragaman nilai-nilai yang berlaku khas dalam struktur sosial, budaya, politik dan sistem pemerintahan. Keanekaragaman nilai-nilai ini di satu sisi, telah menunjukkan fakta bahwa setiap anasir bangsa Indonesia memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan, sistem demokrasi, struktur sosial, struktur kebudayaan dan sistem ekonomi sendiri dengan berbasis kearifan lokal. Akan tetapi, di sisi lain, keanekaragaman tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang kadangkala bersifat mendasar sehingga dapat menimbulkan konflik dan bahkan perang di antara negara kerajaan yang ada pada saat itu.

Indonesia sebagai bekas negara jajahan selama \pm 350 tahun lamanya, pada dasarnya belum mampu membebaskan diri dari belenggu serta eksekusi penjajahan dan penindasan oleh bangsa lain. Eksekusi penjajahan yang masih dirasakan hingga saat ini adalah bangsa Indonesia masih dihadapkan pada masalah kemelaratan, kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan yang sampai saat ini belum dapat diatasi sebagai bangsa yang sudah merdeka. Dengan kata lain, bangsa Indonesia dituntut bekerja lebih keras lagi agar dapat mengatasi permasalahan tersebut di atas. Dengan demikian makna yang tersirat dan tersurat pada Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 yang sesungguhnya dapat terwujud yakni masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Pelajaran yang dapat ditarik dari negara kerajaan di masa lalu, antara lain adalah : a) Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar seperti yang ditunjukkan oleh setiap negara kerajaan dalam membangun dan mensejahterakan rakyatnya; b) Semua negara kerajaan telah mewariskan beragam pranata sosial, tatanan, nilai-nilai dan pedoman hidup yang diimplementasikan oleh masyarakat. Meskipun di dalam pranata sosial tersebut terdapat potensi konflik terutama jika ada pemaksaan dari kerajaan yang satu terhadap kerajaan lainnya; c) Jika ditilik dari isi dan wujud setiap pranata sosial yang ada pada setiap negara kerajaan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa setiap negara kerajaan telah membuktikan kemampuan menyelenggarakan pemerintahan sendiri yang khas sesuai dengan budaya dan nilai-nilai yang berjalan di negara kerajaan

yang bersangkutan. Hingga saat ini, sistem nilai yang diwariskan oleh semua negara kerajaan pada dasarnya memiliki karakteristik khas, bersifat unik dan memiliki kebenaran yang bersifat universal. Artinya nilai-nilai yang diwariskan setiap negara kerajaan pada dasarnya sangat sesuai dengan prinsip-prinsip dalam menyelenggarakan negara moderen.

Dilihat dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, pembelajaran integrasi nasional dapat dipilah ke dalam empat episode, yaitu :

a. Zaman sebelum penjajahan

Pada masa sebelum kedatangan bangsa penjajah menunjukkan bahwa setiap komponen bangsa mampu mengembangkan kearifan lokal yang mendasari terbentuknya nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagaimana yang tersimpul dalam ideologi Pancasila dan UUD 1945. Sebelum kedatangan bangsa-bangsa asing, setiap kerajaan sebenarnya telah mampu membentuk sistem sosial, ekonomi, politik dan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kebesaran nama negara kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, ternyata mengundang kedatangan bangsa-bangsa lain datang ke Indonesia baik untuk berdagang dan/atau dengan tujuan ingin menjajah.

b. Zaman penjajahan

Pada zaman penjajahan, keadaan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia seolah-olah berbalik 180° sebelum penjajahan. Di bawah kejayaan kerajaan Sriwijaya dan Mojopahit masyarakat mengalami kondisi adil makmur (*gemah ripah loh jinawi*), tenteram dan damai (*tata tenteram kerto raharjo*). Tetapi semenjak penjajah menginjakkan kakinya di bumi nusantara ini, Indonesia menjadi bangsa yang menderita, melarat, miskin, sengsara, hina dan terbelakang. Akibatnya, timbullah ketidakpuasan sebagian putra/putri bangsa Indonesia dan keinginan untuk melakukan perlawanan maupun pemberontakan terhadap penjajah baik secara fisik maupun sosial. Perlawanan terhadap penjajah pada dasarnya adalah sikap antipati yang ditunjukkan bangsa ini terhadap kolonialisme dan imperiaalisme yang tersebar secara merata di seluruh wilayah nusantara. Gerakan menentang penjajah telah tersebar merata mulai dari Pulau Sumatera di sebelah Barat sampai

pulau Papua di sebelah Timur. Berbagai pemberontakan terjadi seperti di Aceh, Sumatera Utara, Sumatra Barat/Padang, Palembang, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Pulau Bali, Pulau Lombok, Kepulauan Maluku, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan pulau-pulau lain di seluruh wilayah Indonesia. semua itu pada dasarnya merupakan ekspresi dan luapan rasa ketidak puasan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Kegigihan dan keberanian yang ditunjukkan putra/putri daerah wajib diapresiasi dalam bentuk pemberian gelar atau tanda jasa sebagai pahlawan nasional.

c. Zaman pergerakan nasional

Perlawanan yang dilakukan putera/puteri di seluruh pelosok nusantara itu masih sporadis atau bersifat kedaerahan. Sehingga sangat mudah ditaklukan oleh penjajah. Belajar dari pengalaman itu, maka perjuangan menuju Indonesia merdeka diubah dengan cara melalui pergerakan nasional yang terhimpun dalam wadah organisasi. Pergerakan nasional tersebut ditandai oleh berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Masa awal pergerakan nasional ini disebut sebagai angkatan perintis. Sebagai organisasi sosial-politik, Budi Utomo bercita-cita mencapai Indonesia merdeka dengan cara mendahulukan pendidikan. Setelah lahirnya Budi Utomo, maka berdirilah organisasi-organisasi sosial-politik yang lainnya, seperti : Serikat Dagang Islam/Serikat Islam (SDI/SI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Katholik Indonesia Parkindo), *Jong Java*, *Jong Selebés* dan organisasi sosial politik lainnya yang secara bersama-sama menuntut Indonesia merdeka.

Perhimpunan dan organisasi sosial-politik yang didirikan oleh generasi muda telah mengkristal, lebih sistematis dan lebih strategis dalam menyiapkan dan merumuskan kemerdekaan Indonesia. Kristalisasi ini mencapai puncaknya pada saat para pemuda menyampaikan ikrar atau sumpah pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar atau sumpah pemuda meliputi tiga sumpah yaitu *kami putra-putri Indonesia mengaku: (1) bertumpah darah yang satu-tanah Indonesia; (2) berbangsa yang satu-bangsa Indonesia dan (3) menjunjung bahasa persatuan-Bahasa Indonesia*. Dengan diikrarkannya tiga sumpah tersebut maka bangsa Indonesia mampu mewujudkan integrasi nasional pertama. Untuk mengenang kebesaran tersebut maka angkatan 1928 disebut sebagai angkatan

penegak, yang sekaligus mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa tanpa membeda-bedakan unsur-unsur yang bersifat kedaerahan ataupun SARA. Pelajaran yang dapat dipetik dari proses sumpah pemuda adalah bangsa Indonesia mampu mewujudkan Integrasi nasional pertama.

Pasca Sumpah pemuda, putra/putri Indonesia membentuk sebuah lembaga yang diberi tugas untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan, jika Indonesia telah merdeka. Lembaga yang dibentuk diberi nama BPUPKI (dalam bahasa Jepang : *Dukuritsu Zyunbi Coosakai*) dan telah berhasil merumuskan dasar negara (*philosofis gronslag*) dan menyusun rancangan UUD. Dasar negara dan UUD ini sangat diperlukan untuk memenuhi persyaratan bagi berdirinyasebuah negara. Hasilnya, sungguh luar biasa yaitu ditengah proses sidang BPUPKI, kelompok perancang UUD membentuk panitia kecil dan mampu menyusun naskah yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Yakni sebuah naskah yang memuat preambull (pembukaan; yang di dalamnya memuat Pancasila sebagai dasar negara). BPUPKI juga berhasil merancang Batang Tubuh UUD 1945 (berisi XVI Bab, 37 pasal, IV pasal Aturaan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan). Piagam Jakarta menjadi modal yang sangat penting bagi Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 di mana bangsa Indonesia telah siap untuk menyelenggarakan hidup dan kehidupan bangsa yang merdeka. Pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, PPKI yang dibentuk tanggal 9 Agustus 1945 sebagai pengganti BPUPKI berhasil menetapkan : 1) Pembukaan UUD 1945 yang naskahnya di ambil dari naskah Piagam Jakarta dengan melakukan beberapa perubahan. Seperti : menghilangkan 7 (tujuh) kata yang ada pada alinea IV yakni pada kalimat : “.....berdasar pada Ketuhanan *dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*” Diganti menjadi : “....Ketuhanan Yang Maha Esa” seperti sekarang; 2) Sidang PPKI juga berhasil menetapkan UUD, yang naskahnya dirancang BPUPKI dan 3) Mengangkat Ir. Soekarno dan Drs. Moh Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Negara Republik Indonesia,

Pelajaran yang dapat dipetik dari penetapan Pembukaan UUD 1945 oleh PPKI, khususnya dengan pengubahan alinea IV, yakni pada sila pertama Pancasila adalah sikap berbesar hati , lapang dada, toleransi yang begitu tinggi umat Islam terhadap kelompok masyarakat non muslim. Hal ini menunjukkan bahwa begitu tinggi

kesadaran masyarakat (dalam hal ini : umat Islam) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari bangsa Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara.

d. Zaman setelah kemerdekaan

Pasca kemerdekaan, ternyata terjadi perbedaan, gesekan dan bahkan pertentangan ideologis, politis, ekonomis dan kepentingan individu atau kelompok. Akibatnya, terjadi ketidakpuasan dan ekstrimitas yang dilatarbelakangi oleh kekuatan agama, komunis, dan kondisi tertentu di mana orang/kelompok orang ingin memaksakan kehendak baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Bangsa Indonesia sepakat bahwa ekstrimitas yang berasal dari dalam dikelompokkan menjadi tiga ekstrim, yaitu : (1) ekstrim kanan yaitu ekstrim yang ingin menyelenggarakan negara dengan dasar agama; (2) ekstrim kiri yaitu ekstrim yang ingin menyelenggarakan negara dengan dasar komunis dan (3) golongan tidak puas, yaitu ekstrim yang memanfaatkan kondisi tertentu untuk memaksakan kehendak kepada pemerintah yang sah. Sedang, ekstrimitas yang berasal dari luar negeri, muncul sebagai bagian dari tekanan dan pengaruh globalisasi yang dikaitkan dengan isu-isu : (1) Pelanggaran HAM dan Human Trafficking; (2) Isu demokratisasi; (3) Isu Liberalisasi ekonomi.

2. Integrasi nasional dalam kemajemukan penduduk dan kondisi geografis Indonesia

Pembangunan bangsa memerlukan perhatian khusus terhadap kemajemukan penduduk yang terdiri dari beragam SARA, latar belakang geografis, latar belakang kebudayaan dan sebagainya. Kajian penduduk dapat dilihat dari jumlah, distribusi dan komposisi penduduk. Permasalahan yang muncul adalah jumlah penduduk Indonesia saat ini tersebar tidak merata dan memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dari sisi jumlah, jumlah penduduk sebesar 250 juta merupakan jumlah terbesar ke empat dunia setelah RRT (1,5 milyar), India (1,2 milyar) dan USA (600 juta) atau 250 juta di antara 7 milyar penduduk dunia. Letak permasalahannya adalah jumlah penduduk berkaitan erat dengan tingkat kemakmuran bangsa. Artinya, jumlah penduduk berkaitan langsung dengan upaya memenuhi

kebutuhan dasar/pokok manusia baik pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan maupun rekreasi bagi semua warganegara.

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan memunculkan masalah baru yaitu keseimbangan antara jumlah kelahiran dengan ketersediaan kebutuhan dasar tersebut. Artinya, jika jumlah penduduk tumbuh secara rerata 3% (7,5 juta) per tahun maka 10 tahun lagi pada tahun 2025 jumlah penduduk Indonesia akan berjumlah 325 juta, dan pada 25 tahun lagi (satu generasi) pada tahun 2040 akan berjumlah 437,5 juta. Ini berarti bahwa negara Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pokok setiap warganegara terutama kebutuhan pangan, pendidikan, lapangan pekerjaan, perumahan dan sebagainya. Jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali, maka dimungkinkan jumlah penduduk Indonesia akan naik lebih cepat atau dalam deret ukur sedang jumlah kebutuhan pokok akan naik dalam bentuk deret hitung. Akibatnya, bangsa Indonesia akan rentan terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin, berpendidikan rendah dan tidak memiliki pekerjaan tetap (menganggur).

Permasalahan jumlah penduduk jika dikaitkan dengan konfigurasi dan konstelasi wilayah akan memunculkan masalah baru yaitu luas lahan pertanian berubah menjadi pemukiman sehingga produksi barang pertanian semakin menyusut yang membahayakan kecukupan dan ketahanan pangan bagi rakyatnya. Pada saat ini, jumlah penduduk masih memusat di Jawa (60%; atau 150 juta jiwa) akibatnya lahan pertanian tidak akan mampu menyediakan bahan kebutuhan pokok bagi warganya. Konsekuensinya, jika jumlah penduduk masih memusat di Jawa maka dapat diduga lahan pertanian akan berubah fungsi menjadi pemukiman sehingga rentan terhadap krisis atau kekurangan pangan baik dalam konteks Jawa maupun dalam skala nasional. Dengan demikian, negara harus mengambil kebijakan nyata di bidang kependudukan baik melalui program keluarga berencana maupun program transmigrasi.

Konstelasi wilayah Indonesia terletak pada posisi silang, yaitu menjadi pusat lalulintas kekuatan dan pengaruh asing yang terbuka lebar setiap saat, dari segala penjuru sedang daya adaptasi bangsa masih rendah. Akibatnya, setiap komponen bangsa harus berhadapan dengan pengaruh dan tekanan globalisasi baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan-keamanan, dan aspek

kehidupan lain yang terkait seperti pendidikan, teknologi, lingkungan hidup, HAM dan sebagainya. Gelombang dan arus global yang terjadi tidak mungkin dapat dicegah, dibendung atau ditolak namun yang lebih penting bagi bangsa Indonesia adalah bagaimana cara memperkuat dan mempertahankan jati diri bangsa sehingga tidak larut dalam nilai-nilai baru yang bertentangan dengan budaya bangsa sendiri.

Distribusi atau sebaran penduduk Indonesia 60% (150 juta penduduk) terpusat di Jawa, Madura dan Bali. Jumlah pulau di Indonesia adalah 17.557 pulau, baik besar maupun kecil, akibatnya, sebagian wilayah Indonesia berpenduduk sedikit dan bahkan tidak berpenduduk sama sekali. Ketimpangan distribusi penduduk tersebut sangat rentan terhadap pertumbuhan ekonomi yang merata, pertahanan-keamanan negara, pencurian kekayaan alam baik hayati maupun non-hayati (hasil hutan, ikan, hasil tambang) setiap saat di seluruh wilayah utamanya pada wilayah yang tidak berpenduduk. Oleh karena itu kegiatan transmigrasi dan penempatan penduduk pada pulau-pulau terluar di seluruh wilayah menjadi kebutuhan penting dalam menjaga, mempertahankan dan mengamankan bangsa dan negara.

Komposisi penduduk Indonesia jika dilihat dari tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, usia penduduk dan sejenisnya masih menunjukkan ketidak seimbangan komposisi. Berdasar Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) tingkat pendidikan Indonesia masih tergolong rendah yaitu No 108 dari 187 negara. Indikatornya, sebagian Warga Negara Indonesia yang berusia pendidikan dasar masih terdapat yang buta huruf. Jumlah penduduk yang melaajutkan pendidikan dari pendidikan dasar ke pendidikan menengah dan dari pendidikan menengah ke pendidikan tinggi semaki mengecil sehingga rasio lulusan SD, SLP, SLA dan PT menurun drastis yaitu dari 100% siswa SD yang melanjutkan studi sampai di perguruan tinggi tinggal sekitar 10%.

Jenis pekerjaan yang tersedia di Indonesia dapat dipilah menjadi tiga kelompok yaitu pekerjaan yang berkaitan dengan Pegawai Negeri sekitar 10 juta orang, pekerja swasta sekitar 100 juta sedang orang tidak bekerja sekitar 100 juta. Ketidak merataan komposisi pekerjaan tersebut di satu sisi menimbulkan kecemburuan sosial yang mengarah pada berbagai ekspresi ketidakpuasan seperti

demonstrasi dan pemogokan kerja. Permasalahan yang dituntut oleh para pekerja adalah besaran upah yang mencukupi kebutuhan dasar bagi diri dan keluarganya. Dalam praktik pengupahan pekerja di Indonesia dikenal UMR (Upah Minimum Regional) yang hanya berlaku pada diri pekerja saja sedang keluarganya seperti tunjangan anak, istri dan tunjangan lain belum dimasukkan ke dalam komponen upah pekerja.

3. Integrasi nasional dan kemajemukan budaya

Permasalahan integrasi nasional, pada umumnya dialami oleh setiap negara baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Runtuhnya *United State Socialis Rusia* (USSR) dan Yugoslavia pada dasarnya adalah bukti bahwa kedua negara tersebut tidak mampu menjaga dan mempertahankan negara kesatuannya sehingga terpecah-pecah menjadi banyak negara baru. Dalam memasuki abad XXI (milenium ke 3) setiap negara dihadapkan pada wacana dan pengaruh globalisasi di mana setiap orang suka atau tidak; mau atau tidak mereka harus masuk di dalam wacana dan tontonan yang sama sekali baru yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Era global yang ditandai oleh perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi telah menjadikan dunia yang luasnya sama seakan-akan menciut dan tanpa batas. Dengan memanfaatkan hasil teknologi *Hand Phone* (HP) atau telepon orang dapat mengikuti setiap perkembangan ditempat lain dalam waktu yang hampir bersamaan. Sedang dengan menggunakan teknologi transportasi pesawat terbang supersonic orang dapat berpindah dengan cepat meskipun jaraknya ribuan kilometer.

Bangsa Indonesia terbentuk dari unit-unit sosial yang sudah teruji keampuannya di mana setiap suku memiliki dan mengembangkan konsep dan prinsip-prinsip kearifan lokal yang khas dan sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kebutuhan saat ini adalah bagaimana bangsa Indonesia menemukan kembali nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka memperkokoh identitas nasional ditengah-tengah keragaman budaya bangsa. Tiap suku telah mengembangkan tradisi dan budaya lokal sendiri sebagaimana tercermin dalam sistem sosial, struktur sosial, sistem ekonomi yang lebih kecil sehingga mampu berfungsi sebagai pengikat bagi anggota kelompok dalam suku itu.

Pada saat ini, upaya pembangunan bangsa sering melupakan kemajemukan budaya dengan segala konsekuensinya. Dalam hal ini, sebagian orang berpendapat bahwa nilai budaya yang sudah mapan tidak perlu diubah dengan alasan sudah merupakan sebuah kebenaran mutlak. Sebagian orang yang lain, berpendapat sebaliknya yaitu menghendaki perubahan dan penggantian. Ini berarti bahwa sebagian orang menganggap bahwa masyarakat itu merupakan kesatuan sosial yang utuh dan mendukung tradisi dan budaya yang sama. Dengan demikian orang dapat menghindari adanya pengelompokan sosial keberagaman sosial hal yang harus dihindari adalah adanya ketegangan, pertentangan dan stereotipe yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dan sebaliknya, bangsa Indonesia harus mampu mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut dalam rangka memperkokoh kesatuan sosial.

Dinamika pergolakan masalah sosial yang bersumber dari perbedaan budaya lokal, harus diantisipasi sedini mungkin agar tidak berkembang menjadi konflik sosial dan berpuncak pada terjadinya revolusi sosial. Ketidakmampuan mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, *trafficking*, dan masalah sosial lainnya dikuatirkan akan merembet pada masalah lain yang lebih luas. Bangsa Indonesia beruntung bahwa prinsip dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat tidak mengenal adanya supremasi mayoritas dan tirani minoritas. Ini berarti bahwa bangsa Indonesia mampu mendudukan permasalahan budaya bangsa sesuai dengan konteksnya sehingga pertikaian antar unsur budaya tidak pernah terjadi.

Permasalahan yang mengedepan dalam menata kehidupan yang sejajar antar unsur budaya terletak pada adanya perbedaan peradapan antar suku bangsa. Sebagian anggota masyarakat Indonesia masih terasing dan sebagian lagi berpendidikan rendah sehingga terjadi ketimpangan terhadap kemajuan di bidang pendidikan. Akibatnya, masyarakat yang berpendidikan rendah tidak dapat memasuki ruang pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu. Permasalahan lain yang sering muncul adalah hubungan timbal balik antara penduduk asli dengan para pendatang atau keturunan asing, di mana sebagian penduduk asli pada umumnya tidak siap bersaing dengan para pendatang sehingga terjadi kecenderungan semakin tertinggal baik di bidang ekonomi, pendidikan maupun di

bidang yang lain. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa penduduk yang masih bertempat tinggal di daerah asal pada umumnya tidak cepat berkembang daripada merantau di tempat lain. Pergaulan dengan lingkungan luar kelompoknya pada dasarnya memberikan dorongan dan motivasi untuk semakin maju dan menyempurnakan kehidupannya.

Bertolak dari pasal. 32 UUD 1945 maka makna kebudayaan nasional harus merupakan kerangka acuan bagi setiap penduduk untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kuatnya pengaruh kebudayaan terhadap kebudayaan lokal atau perilaku penduduk terjadi karena hampir semua penduduk telah menerima dan mendukung kebudayaan nasional sebagai pedoman bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Kehadiran kebudayaan nasional di tengah-tengah budaya daerah atau suku tertentu mampu mengisi kekosongan sistem nilai yang berlaku secara nasional, terutama apabila budaya daerah belum memuatnya.

Kajian kebudayaan nasional yang khas Indonesia, pada dasarnya dapat dipilah menjadi tiga kelompok yaitu : (1) kebudayaan suku bangsa; (2) kebudayaan daerah dan (3) kebudayaan nasional. Masing-masing kebudayaan berfungsi sebagai kerangka acuan serta menjadi lingkungan tempat bersemainya atau tumbuh kembangnya pergaulan antar anggota masyarakat. Aplikasi dari setiap kebudayaan tersebut mampu memperlancar hak dan kewajiban sosial setiap warga masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai dan kreativitas penduduk atau anggota masyarakat. Pengembangan kebudayaan nasional yang berbasis pada ketiga kelompok budaya di atas pada akhirnya akan mampu memperkokoh dan meningkatkan keterlibatan sosial setiap anggota masyarakat.

Pengembangan kebudayaan nasional sebagai satu kesatuan sangat diperlukan pada masyarakat yang bersifat majemuk seperti Indonesia. Sumbangan kebudayaan nasional terhadap pembagian kekuasaan politik, ekonomi dan pemerintahan mampu memberikan simbol-simbol dan pranata sosial para tokoh atau pejabat dari tingkat pusat sampai RT dan RW sebagai satuan jabatan terkecil di daerah. Nilai-nilai ini telah diimplementasikan ke dalam beragam aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh setiap

penduduk sudah tidak asing lagi dengan kegiatan gotong royong, azas musyawarah dan mufakat.

Pengalaman sejarah di masa lalu telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia mampu menyelenggarakan sistem dan pranata sosial, politik, ekonomi, kebudayaan maupun pertahanan-keamanan. Dalam struktur sosiaal-budaya yang sudah mapan maka setiap komponen bangsa mampu membangun peradapan yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat mewujudkan nilai-nilai kesejahteraan dan ketenteraman bagi diri dan lingkungannya. Masyarakat yang memiliki peradaban tinggi memungkinkan bagi tumbuh kembangnya nilai-nilai budaya terluhur. Nilai-nilai tersebut merupakan ekspresi kearifan lokal dan identitas diri yang dijadikan pedoman dan petunjuk dalam mengembangkan tatanan kehidupan berkelompok.

Pelajaran yang dapat dipetik dari nilai-nilai kearifan lokal, tradisi dan nilai-nilai terluhur budaya adalah ditemukannya kesamaan terhadap prinsip-prinsip, etika, norma dan petunjuk hidup yang bersifat dan berlaku secara universal. Artinya, setiap daerah memiliki pranata sosial-budaya yang berlaku di daerah lain. Dalam hal ini ternyata nilai, norma dan pranata sosial budaya memiliki kesamaan dalam arti apa yang baik atau tidak baik di satu daerah juga berlaku sama di daerah lain.

Kemajemukan tradisi dan budaya daerah secara bersama-sama membentuk budaya nasional yang kokoh dalam bentuk saripati nilai-nilai terluhur budaya sebagaimana yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, kemajemukan tradisi dan budaya bukan masalah melainkan justru menjadi pengikat perbedaan sebagaimana yang tersimpul dalam sesanti "*Bhinneka Tunggal Ika*". Dengan demikian, kemajemukan tradisi dan budaya lokal pada akhirnya mampu memperkaya dan diintegrasikan ke dalam kebudayaan nasional secara utuh-menyeluruh. Dalam studi integrasi nasional, perbedaan dan keanekaragaman tradisi dan budaya lokal harus dipandang sebagai asset bangsa yang tak ternilai harganya karena mampu mempersatukan bangsa dan negara di atas perbedaan.

4. Integrasi nasional dan tugas-tanggung jawab masa depan

Integrasi nasional merupakan bagian penting dari pengembangan budaya bangsa dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan serta jatidiri bangsa seutuhnya. Bangsa Indonesia yang terbentuk dari kemajemukan SARA serta memiliki latar belakang sebagai bangsa terjajah selama $3\frac{1}{2}$ abad, memerlukan konsep perpaduan baru yang mampu membina, menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup dan eksistensinya sebagai bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat di tengah-tengah bangsa lainnya. Karakteristik “kebhinnekaan isi” tersebut pada dasarnya adalah modal dan *asset* bangsa yang tak ternilai harganya, karena pengalaman di masa lalu telah mampu membentuk kesatuan sosial dan jatidiri bangsa yang hidup rukun, damai dan penuh toleransi diantara unsur-unsur SARA di atas. Akan tetapi, “kebhinnekaan isi” dapat berubah menjadi sumber ancaman dan marabahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa bila ada pihak-pihak yang berupaya memaksakan kehendak baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan-keamanan.

Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa negara-negara kerajaan di masa lalu telah mampu membentuk struktur sosial-politik yang mapan dan hidup berdampingan secara damai satu dengan yang lain. Kondisi kehidupan yang aman, tenteram dan damai tersebut seringkali timbul perpecahan terutama akibat penerapan politik pemecah belahan atau *divide et impera* yang dilakukan oleh pemerintah kolonial dan faktor pertikaian keluarga untuk perebutan tahta. Pada saat ini, bangsa Indonesia telah memasuki tekanan dan pengaruh global sehingga

mau atau tidak mau, suka atau tidak harus masuk di dalamnya, padahal daya adaptasi bangsa masih rendah. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memiliki tanggungjawab yang besar untuk mempertahankan jatidiri sebagai bangsa yang berbudaya.

Nampaknya, bangsa Indonesia dalam memasuki era global masih kuat dalam upaya mempertahankan jatidiri bangsa. Akan tetapi kecenderungan mempertahankan nilai-nilai kesukuan dan kedaerahan masih dominan dalam pergaulan nasional. Dengan berlakunya otonomi daerah maka kecenderungan daerah untuk mempertahankan eksklusifisme kesukuan dan putra daerah menjadi tema penting dalam memasuki era global ini. Pada dasarnya, prinsip-prinsip kedaerahan yang berkembang selama ini, menunjukkan bahwa orang belum dapat melepaskan diri dari belenggu dan dominasi kepentingan kedaerahan. Euforia kedaerahan, kadang-kadang berbenturan dengan putra daerah yang telah keuar daerah dan menjadi perantau yang lama. Akibatnya, sebagian keturunan putra daerah yang telah lama merantau sudah tidak mengenal budaya asal, tradisi asal, bahasa daerah dan beragam tatanan kehidupan di daerah asalnya.

Tanggungjawab masa depan bangsa sebagai kerangka acuan pergaulan nasional dan internasional dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu : (1) faktor kependudukan; (2) faktor kemampuan kebudayaan daerah atau suku; dan (3) faktor sosial, politik, ekonomi beserta aspek pemeratannya. Ketiga faktor tersebut, menjadi pengikat dan penjamin kelancaran proses transformasi nilai-nilai, peran serta partisipasi masyarakat dalam pergaulannya. Kenyataan menunjukkan bahwa pusat-pusat pertumbuhan masih berkisar pada kota-kota besar sehingga ada kecenderungan bagi daerah-daerah terpencil dan belum maju untuk mendatangi

dan bermigrasi ke pusat-pusat pertumbuhan terutama di kota-kota besar di pulau Jawa. Dalam hal ini perlu diatur bahwa putra-putra daerah yang merantau di pulau Jawa seharusnya mau kembali ke daerah asal untuk membangun dan memajukan daerahnya.

Kembalinya putra daerah dan kesediaan para lulusan perguruan tinggi untuk membangun daerah terpencil atau yang belum maju diyakini akan mampu mendongkrak kemajuan yang merata di seluruh wilayah. Kenyataan yang berkembang pada akhir-akhir ini adalah isu putra daerah untuk menduduki kekuasaan politik pada posisi penting dan menentukan bagi daerahnya. Oleh karena itu, perlu ditata kembali pengisian jabatan politik dan jabatan lain di daerah sehingga orang tidak lagi mempersoalkan asal-usul dan dominasi kelompok mayoritas di seluruh wilayah Indonesia.

Soal-Soal Latihan :

Soal Obyektif : Pilih jawaban yang paling benar

1. Bangsa Indonesia tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, agama, wilayah maupun bahasa daerah, namun dapat bersatu dalam persatuan, karena
 - a. Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika"
 - b. Nilai-nilai Pancasila
 - c. Adanya identitas yang sama
 - d. Adanya kesadaran yang sama
2. Antara pembangunan nasional dan persatuan dan kesatuan
 - a. Memiliki hubungan yang saling mendukung
 - b. Tidak memiliki hubungan
 - c. Memiliki hubungan yang berbanding terbalik
 - d. Memiliki hubungan paralel
3. Peraturan terbaru yang mengatur tentang lambang negara di atur melalui
 - a. Peraturan Presiden No. 4 tahun 2009

- b. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2009
 - c. Undang Undang No. 4 tahun 2009
 - d. Undang Undang No. 24 tahun 2009
4. Burung Garuda dipakai sebagai lambang negara oleh bangsa Indonesia dengan beberapa alasan, antara lain
- a. Memiliki jasa pada negara
 - b. Burung yang paling tua dan dilindungi
 - c. Burung yang melambangkan adanya cita-cita yang tinggi
 - d. Burung yang besar melambangkan kebesaran bangsa Indonesia
5. Bendera Merah Putih, Garuda Pancasila, Lagu Indonesia Raya dan Bahasa Indonesia yang dimiliki bangsa Indonesia yang mencerminkan jati diri bangsa, merupakan lambang atau simbol
- a. Kedaulatan
 - b. Kebebasan
 - c. Kemerdekaan
 - d. keramahan
6. Identitas nasional terbentuk dari adanya interaksi secara terintegrasi antara beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang dimaksud, adalah
- a. Dominasi penjajah sebagai faktor primer
 - b. Dimilikinya bahasa persatuan sebagai faktor pendorong
 - c. Adanya keanekaragaman sebagai faktor primer
 - d. Pembangunan nasional sebagai faktor penarik

DAFTAR PUSTAKA

- Besar, Abdulkadir. 1995. *Cita Negara Persatuan Indonesia*. BP-7 Pusat. Jakarta
- Ismaun.1981. *Pembahasan Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia*. CV. Yulianti. Bandung
- Kaelan.2012. *Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*.Paradigma. Yogyakarta
- Notonagoro. 1975. *Pancasila Ilmiah Populer*. Panturan Tujuh. Jakarta
- Prayitno,H.A dkk.1987.*Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (KADEHAM)*. Prayitno., H.A dan Mintargo, Bambang S (ed). Penerbit Universitas Tri Sakti

Suryo, Joko. 2002. *Pembentukan Identitas Nasional*, Makalah Terbatas Pengembangan Wawasan tentang Civic Education. LP3UMY : Yogyakarta

Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Lambang Negara Indonesia

PLPG 2016